

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan, negara-negara di Asia Tenggara memiliki jumlah persentase yang rendah dalam partisipasi politik perempuan terutama dalam partisipasi politik di parlemen pemerintahan. Hal ini disebabkan eratnya nilai-nilai kebudayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat Asia Tenggara secara turun temurun. Nilai-nilai yang dianut juga sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat dalam hal prinsip, ideologi, hingga pengaturan norma sosial. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat dan tantangan terbesar bagi masuknya pemahaman baru seperti feminisme atau kesetaraan gender.

Seperti negara Asia Tenggara lainnya, Malaysia juga menghadapi tantangan serupa. Nilai-nilai tradisional berbasis islam telah menjadi bagian dari pembentukan negara dan pola pikir masyarakat. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap rendahnya kesetaraan gender dan tingginya *gender gap* di Malaysia. Pada sektor politik, tingkat partisipasi perempuan menjadi sangat rendah dan peningkatan yang terjadi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Sebagian besar masyarakat Malaysia juga masih belum menaruh perhatian isu ini bahkan tidak menunjukkan dukungan terhadap kesetaraan gender dan hak-hak bagi perempuan.

Melalui perspektif feminisme liberal, penulis melihat isu ini sebagai salah satu yang seharusnya menjadi urgensi pemerintah dan masyarakat, mengingat kebijakan pemerintah juga melibatkan masyarakat perempuan,

sehingga penting bagi mereka untuk turut terlibat sebagai bagian dari warga negara. Aliran feminisme liberal mempercayai bahwa perempuan terkekang dan ter subordinasi oleh sistem hukum yang tidak berpihak kepada perempuan. Dengan begitu, untuk mencapai kesetaraan, maka diperlukan perbaikan pada sistem hukum agar tidak ada bias terhadap gender. Selain kebijakan, diperlukan juga upaya kesadaran diri pada tiap individu untuk menghilangkan bentuk-bentuk budaya yang lebih samar dan bias agar tidak terus berlanjut.

Dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan pada dalam partisipasi politik, feminisme liberal mendorong terciptanya inklusivitas melalui dasar pemahaman akan kesetaraan dan dampak positif yang bisa didapatkan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan parlemen pemerintahan untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan yang bersifat adil dan dapat melindungi seluruh warga negara. Dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, pemerintahan Anwar Ibrahim sudah menunjukkan upaya peningkatan yang ditandai dengan jumlah perempuan di kursi pemerintahan dan munculnya kebijakan-kebijakan yang bersifat inklusif dan bertujuan untuk memberikan dampak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan berdasarkan etnisitas seperti yang terjadi selama ini.

4.2 Saran

Penelitian ini menganalisis partisipasi politik perempuan Malaysia pada masa pemerintahan Anwar Ibrahim yang baru berjalan selama kurang lebih dua tahun. Pemerintahan ini menerapkan konsep baru yang berbeda dari pemerintahan Malaysia sebelumnya, sehingga belum banyak data atau analisis

yang dilakukan terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim saat ini. Keterbatasan data juga terkait dengan pembaruan data yang akan terus terjadi sehingga basis data penelitian harus diperbarui kembali untuk melihat perubahan yang terjadi.

Malaysia merupakan negara multi-etnis yang masih memegang erat nilai-nilai tradisionalnya. Penulis menggunakan pendekatan feminisme liberal untuk menganalisis bagaimana kesetaraan dan hak individu dapat diimplementasikan dan meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pembuatan kebijakan. Akan tetapi, aspek budaya yang sangat penting dan menjadi latar belakang permasalahan tidak dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk menggunakan perspektif lain dan membahas lebih dalam terkait faktor kebudayaan dan keagamaan yang melekat kuat dan menjadi tantangan terbesar.